

Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.

KOMISI NEGARA INDEPENDEN

Eksistensi *Independent Agencies*
sebagai Cabang Kekuasaan Baru
dalam Sistem Ketatanegaraan

Kata Pengantar:

Moh. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.



KOMNAS HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASIAN MANUSIA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR <i>Moh. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.</i>	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Memahami dan Menerima Perubahan	2
B. Penegasan Istilah	12
C. Reaksi dan Pilihan Arus	13
D. Pendekatan dan Bahan Hukum	15
E. Keaslian Kajian	17
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II PEMBATASAN KEKUASAAN

A. Kekuasaan	26
B. Pemisahan Kekuasaan	29
C. Tinjauan Singkat Tiga Cabang Kekuasaan Konvensional	34
1. Cabang Kekuasaan Legislatif	34
2. Cabang Kekuasaan Eksekutif	36
3. Cabang Kekuasaan Yudikatif	37
D. Kritik atas Konsep Pemisahan Kekuasaan Konvensional	38
E. Peristilahan <i>Separation of Power</i> dan <i>Division of Power</i>	42

F. <i>Checks and Balances</i>	43
G. <i>Pasca Trias Politica</i>	47
BAB III KELEMBAGAAN NEGARA MENURUT UUD 1945	
A. Definisi dan Konsepsi Lembaga Negara	52
B. <i>Trias Politica</i> dan Lembaga Negara	55
C. Perkembangan Lembaga Negara	57
D. Lembaga Negara menurut UUD 1945	58
E. Klasifikasi Lembaga Negara	62
F. Lembaga Negara dalam UUD 1945	67
BAB IV REDISTRIBUSI KEKUASAAN DAN MODEL HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA	
A. Redistribusi Kekuasaan Negara	73
B. Model Hubungan Antarlembaga Negara	77
BAB V EKSISTENSI KOMISI NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	
A. Komisi Negara Independen (<i>Independent Agencies</i>)	85
1. Tinjauan Singkat <i>Independent Agencies</i> di Beberapa Negara	85
2. Latar Belakang Keberadaan Komisi Negara Independen	88
3. Legitimasi Kewenangan	91
4. Karakteristik Kelembagaan	93
5. Komisi Negara Independen di Indonesia .	97
a. Komisi Yudisial	100
b. Komisi Pemilihan Umum	102
c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ..	104
d. Komisi Pemberantasan Korupsi	106
e. Ombudsman Republik Indonesia	108

f. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	109
g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	111
h. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	113
i. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ...	115
j. Komisi Penyiaran Indonesia	117
k. Dewan Pers	119
l. Dewan Pendidikan	121
m. Komisi Informasi	123
n. Badan Pengawas Pemilu.	125
o. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	127
6. Tinjauan Singkat Empat Komisi Negara Independen	134
B. Rekonstruksi Teoritik Eksistensi Komisi Negara Independen pada Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia	143
C. <i>Checks and Balances</i> Komisi Negara Independen terhadap Cabang Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia	150
1. <i>Checks and Balances</i> antara Komisi Negara Negara Independen dan Cabang Kekuasaan Legislatif	153
2. <i>Checks and Balances</i> antara Komisi Negara Independen dan Cabang Kekuasaan Eksekutif	157
3. <i>Checks and Balances</i> antara Komisi Negara Independen dan Cabang Kekuasaan Yudikatif	160
D. Tantangan Ke Depan	167
SENARAI PUSTAKA	171
TENTANG PENULIS	177